

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SKB PACITAN

Maryono

Dosen STKIP PGRI Pacitan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pendidikan kewirausahaan dan faktor penghambatnya di SKB Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian dipilih secara *purposive*, terdiri dari pengelola, tutor, dan warga belajar setara Paket C. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan kajian dokumen. Pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan *member check*. Teknik analisis data meliputi tahap mereduksi, menyajikan data dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SKB Pacitan dilaksanakan mengacu kebijakan pemerintah pusat (UU, PP, Permendiknas RI), menggunakan kurikulum 2006, melaksanakan program SKB berbasis peminatan atau potensi peserta didik dan potensi lokal Pacitan meliputi 3 tahap Tahap persiapan: observasi, analisis dokumen dan pendataan warga belajar, penentuan jenis program dan jadwal pembelajaran; tahap pelaksanaan: dilaksanakan secara terpadu yaitu teori dan praktik, waktu pelaksanaan adalah sehari tiap minggu, jumlah peserta didik sesuai peminatan, yaitu pendidikan komputer, menjahit, sablon digital, dan *gemstone*, materi pembelajaran dengan modul, ketersediaan fasilitas di SKB cukup baik, metode pembelajaran meliputi ceramah dan praktek, tahap evaluasi dengan ujian tertulis dan uji kompetensi pada lembaga mitra yang ditunjuk; (2) faktor penghambat adalah: keterbatasan pendanaan untuk biaya penyelenggaraan, tidak adanya permodalan untuk pengembangan warga belajar dan lulusan, kurangnya pelatihan dan perhatian dari pihak Pemda dan eksternal.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan pendidikan, kewirausahaan

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang kompleks. Tantangan *pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan informasi yang semakin pesat di era globalisasi membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pada tiap negara. Melalui

penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan bermutu, diharapkan dapat mewujudkan manusia yang berkualitas. Hal ini berdasarkan pertimbangan penting karena penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang akan dicapai. Secara umum, keberhasilan tujuan pendidikan tidak hanya dicapai melalui pendidikan formal. Bentuk pendidikan non formal atau disebut pendidikan luar sekolah juga memberikan kontribusi yang penting guna membentuk sumber daya manusia yang diharapkan. Kedua bentuk pendidikan tersebut memiliki peran yang sama untuk tugas transformasi sosial budaya lewat transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan, sikap,

ketrampilan, dan nilai-nilai budaya kepada individu dan masyarakat. Proses pendidikan diselenggarakan agar terjadi proses belajar dan pembelajaran yang mengarah pada perubahan positif pada aspek intelektual, mental, sosial, dan fisik.

Terdapat tiga pokok pikiran utama yang terkandung pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan tenaga-tenaga yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangan, karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Ini berarti bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas, baik material, spriritual serta sosial budaya.

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik (Supriyono, 2009:2). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (UU No. 20/2003, Bab I Pasal Ayat 20). Istilah “pembelajaran” sama dengan “*instruction*” atau “pengajaran”. Pengajaran mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan. Dengan demikian pengajaran diartikan sama dengan perbuatan

belajar (oleh siswa) dan mengajar (oleh guru). Winkel (Sutikno, 2013:31) mengartikan pembelajaran sebagai seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berlangsung di dalam diri peserta didik. Menurut Sutikno (2013:31), pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada siswa. Pembelajaran adalah segala upaya atau kegiatan yang dirancang oleh guru (pendidik) untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal dalam usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar yang berlangsung di dalam diri peserta didik agar terjadi proses belajar sebagai upaya untuk membelajarkan siswa.

Proses belajar dan pembelajaran dapat dilakukan berbasis masyarakat. Hal ini ini berdasarkan pertimbangan bahwa berbagai keahlian atau kecakapan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat harus mampu mengedepankan pendidikan yang mempunyai dasar pada kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup banyak diselenggarakan oleh lembaga non formal berbasis masyarakat.

Tujuan pendidikan luar sekolah sebagaimana digariskan PP Nomor 73 tahun 1991 adalah (a) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupannya, (b) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan (c) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Untuk mencapai tujuannya, fungsi pendidikan luar sekolah antara lain mengembangkan cipta, rasa, dan karsa warga belajar agar lebih kreatif, mampu memahami lingkungannya, dan mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasikan diri. Dari segi waktu, pendidikan luar sekolah ditetapkan sesuai dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik. Program pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan peserta didik. Sedangkan proses belajar dan pembelajaran dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian (Kamil, 2010: 33-35).

Keberadaan sistem pendidikan luar sekolah (nonformal) mulai diminati masyarakat meskipun jauh dari perhatian sebagaimana pada pendidikan formal. Keberadaan pendidikan luar sekolah dianggap mampu melengkapi kebutuhan belajar masyarakat sesuai dengan kondisi mereka. Banyak penduduk yang kurang dapat mengakses pendidikan formal karena kondisi-kondisi seperti putus sekolah karena tidak memiliki biaya pendidikan, kasus kenakalan remaja, tidak adanya minat sekolah, dan alasan lainnya. Kondisi ini menyebabkan usia produktif yang seharusnya memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan guna dapat melanjutkan proses kehidupan bermasyarakat yang mandiri menjadi sangat kurang. Bagi siswa *drop out* misalnya cenderung kurang memiliki akses pendidikan formal karena mendapat stigma negatif dari masyarakat. Mereka cenderung kurang memiliki *life plan* yang jelas. Beberapa penyebab adalah kurangnya motivasi dari dalam diri.

Keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai lembaga pendidikan di luar sistem pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan alternatif

menjadi harapan baru bagi siswa *drop out* dan warga masyarakat yang belum mengakses pendidikan tingkat SLTP dan SLTA. Pendidikan nonformal meliputi; pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan nonformal berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dirancang dan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan sistem yang luwes, fungsional dan mengembangkan kecakapan hidup untuk belajar sepanjang hayat. Depdiknas membagi kecakapan hidup (*life skill*) menjadi empat jenis, yaitu kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Kecakapan personal dan sosial termasuk kecakapan umum. Kecakapan personal meliputi kecakapan mengenal diri (*self awareness*), dan kecakapan berfikir (*thinking skills*), (Anwar, 2006:28-32).

Untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap layanan dan peningkatan mutu jalur pendidikan nonformal, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, menyusun acuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C (Penjelasan Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003).

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat (6)). Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan lebih menitikberatkan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta cara berfikir untuk memecahkannya melalui pendekatan antar-disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan. Dengan demikian, penilaian dalam pendidikan kesetaraan dilakukan dengan lebih mengutamakan uji kompetensi. Konsekuensi dari pengertian ini adalah setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A dan Paket B mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI dan SMP/MTs untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C setara SMA mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. Berdasarkan kajian Permendiknas RI No 14 Tahun 2007 dan Permen 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, tampaknya ada kecenderungan adanya tuntutan pencapaian kompetensi yang sama antara pendidikan kesetaraan dengan pendidikan formal.

Tenaga kependidikan dan pendidik yang ada dalam program paket dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2000 tentang tenaga kependidikan pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa tenaga kependidikan yang akan ditugaskan untuk bekerja sebagai pengelola satuan pendidikan dan penilik di jalur pendidikan luar sekolah pada dasarnya dipilih dari kalangan tenaga pendidik.

Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/MA. Di samping itu, dalam program Paket C diberikan kurikulum

pendidikan wirausaha agar lulusan peserta didik Paket C memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan dalam dunia pekerjaan. Sedangkan pada SMA atau pendidikan formal belum diberikan pendidikan wirausaha dalam kurikulumnya, jadi peserta didik Paket C secara mental lebih siap untuk bekerja dalam dunia wirausaha dibandingkan siswa SMA pada pendidikan.

Program Paket C diberikan kurikulum pendidikan wirausaha agar lulusan peserta didik Paket C memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan dalam dunia pekerjaan. Sedangkan pada SMA atau pendidikan formal belum diberikan pendidikan wirausaha dalam kurikulumnya, jadi peserta didik Paket C secara mental lebih siap untuk bekerja dalam dunia wirausaha dibandingkan siswa SMA pada pendidikan formal. Hakekat dari program pendidikan kewirausahaan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran penanaman tata nilai kewirausahaan melalui pembiasaan dan pemeliharaan perilaku dan sikap. Metode pembelajaran pendidikan kewirausahaan adalah menanamkan sikap, pembukaan wawasan dan pembekalan pengalaman awal yang dalam proses pembelajarannya bukan sekedar hafalan atau target kognitif, tetapi dipelajari melalui penanaman kebiasaan yang harus dikerjakan atau dilakukan sendiri secara berulang-ulang dan tidak sekedar hanya mengerti dan mengalami.

Pentingnya pendidikan kewirausahaan sebagai bekal bagi warga belajar di pendidikan luar sekolah adalah guna mendukung keberhasilan pembangunan. Sebagaimana disampaikan oleh Alma (2010: -21), wirausaha menjadi potensi pembangunan. Ada dua darma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, yaitu (a) sebagai pengusaha, melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi, (b) sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional,

mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. SKB dan PKBM menjawab kebutuhan masyarakat terhadap upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Macam bidang yang merupakan arahan pendidikan nonformal yakni pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesetaraan, pelatihan dan PAUD.

Memperhatikan tujuan penting penyelenggaraan pendidikan luar sekolah untuk membekali warga belajar yang relevan dengan kebutuhan hidupnya maka pendidikan kewirausahaan menjadi bekal penting bagi warga belajar guna dapat hidup mandiri dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan kewirausahaan di SKB di Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya agar peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta data yang mendalam dari penelitiannya. Menurut Moleong (2011:6), pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian dilaksanakan di SKB Pacitan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Pebruari 2015. SKB Pacitan adalah lembaga pendidikan nonformal yang di dalamnya ada pendidikan kesetaraan kejar Paket C. Program wirausaha yang ada antara lain; (1) ketrampilan komputer, (2)

ketrampilan sablon dan digital, (3) ketrampilan menjahit, dan (4) *gemstone*.

Subyek penelitian dipilih secara *purposive*, adalah warga belajar Paket C perwakilan dari tiap jenis ketrampilan wirausaha, seorang pengelola, dan seorang tutor. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari orang (responden/informan), dokumen atau kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Dilihat dari sumber data, salah satunya adalah sumber tertulis. Bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2011:159).

Beberapa macam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) wawancara semi terstruktur di mana pedoman wawancaranya telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Pedoman umum untuk pertanyaan awal wawancara akan dibuat sama, sedangkan perkembangan berikutnya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan pada masing-masing subyek. (2) Observasi yang dilakukan adalah untuk mengamati secara langsung tindakan apa saja yang dilakukan pihak pengelola SKB Pacitan dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan kewirausahaan, (3) Studi dokumentasi, meliputi kajian literatur dan dokumen-dokumen berupa laporan, foto, dan lain-lain.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SKB Pacitan memiliki 18 tutor meliputi satu kepala sekolah dibantu pendidik dan tenaga kependidikan. Tutor memiliki kualifikasi minimal S1 dan mengajar dan melatih sesuai dengan bidang ilmunya. SKB menerima peserta didik dari berbagai usia dan latar belakang berbeda. Warga belajar di SKB Pacitan berasal dari berbagai kecamatan di kabupaten Pacitan. Kurikulum yang diterapkan adalah KTSP 2006 dan menggunakan SKK (Sistem Kredit Kompetensi). Pembelajaran tiap minggu dilaksanakan selama enam hari, yaitu Senin hingga Jum'at mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00.

Kegiatan pembelajaran meliputi: (1) kegiatan tatap muka (1x50 menit), (2) tutorial (1x90 menit), dan (3) kegiatan mandiri (1x135 menit) atau sebanyak 17 mata pelajaran. Kegiatan tutorial meliputi pemberian materi MKDU, seperti materi matematika, Bahasa Indonesia, PKn, Bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, geografi, sedangkan materi tutorial antara lain pelajaran pendidikan agama, sejarah, fisika, kimia. Muatan ketrampilan meliputi komputer, sablon digital, menjahit, dan *gemstone*. Sedangkan program SKB tahun pelajaran 2014/2015 adalah pemberian kursus brosur (embryo dan hire), budidaya ikan air tawar (belut, nila).

Pada tahap persiapan dilakukan penentuan jenis ketrampilan. Ini berdasarkan penelusuran potensi warga belajar serta berdasarkan peluang usaha lokal. Warga belajar pada tiap tingkatan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Semua warga belajar diberikan kebebasan memilih semua jenis ketrampilan yang akan diikuti dan tidak wajib, artinya menyesuaikan peminatan dan bersifat demokratis. Bagi warga belajar laki-laki cenderung memilih komputer, sablon

digital, dan *gemstone*. Sedangkan warga belajar perempuan lebih banyak memilih komputer dan menjahit. Dengan demikian setiap warga belajar melaksanakan program pendidikan kewirausahaan yang berbeda jumlahnya.

Pendidikan wirausaha tersebut dilaksanakan total tiap hari Rabu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 atau setara lima jam. Warga belajar dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia meliputi ruang komputer, ruang ketrampilan sablon digital, ruang menjahit, dan ruang *gemstone*. Tutor memberikan pembelajaran teori dan langsung praktik menggunakan modul dan sarana belajar yang tersedia.

Sebagai tahapan akhir guna mengetahui keberhasilan pembelajaran maka dilaksanakan tes tulis dan tes praktik oleh sekolah dan uji kompetensi oleh TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang ditunjuk penyelenggara. Dengan demikian SKB menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan dan ketrampilan bersertifikasi nasional untuk uji kompetensi, yaitu Didi Comp (uji komputer) dan LPK (menjahit). Kelulusan ditentukan berdasarkan hasil ujian oleh tim penguji masing-masing ketrampilan. Dengan demikian tiap peserta didik/ warga belajar yang lulus mendapat sertifikat dengan predikat mahir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa peminatan warga belajar pada usaha sablon digital kurang karena hambatan pada pembiayaan praktik yang cenderung mahal. Sedangkan pada usaha menjahit cenderung murah namun kreativitas dan bakat kurang. Pendidikan komputer memiliki peminat terbesar namun warga belajar kurang dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia sesuai tujuan. Sedangkan pelatihan *gemstone* merupakan ketrampilan baru yang banyak diminati setelah produk akik populer. Untuk menjamin mutu warga belajar

diselenggarakan pelatihan tiap satu tahun sekali oleh Dirjen Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan. Inilah yang perlu ditingkatkan intensitasnya agar warga belajar semakin mahir pada kompetensi yang diikuti.

Beberapa kendala yang selama ini dikeluhkan oleh pengelola adalah masih dirasakannya diskriminasi Pemda dalam pemberian perhatian dibandingkan dengan pendidikan formal, misalnya keterbatasan terkait pengawasan mutu penyelenggaraan, pendampingan, pengadaan sarana prasarana, permodalan untuk wirausaha warga belajar. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak pengelola, tutor, dan tenaga kependidikan melakukan upaya-upaya antara lain dengan aktif menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga ketrampilan, kantor/dinas/ badan di lingkungan Pemda, kemitraan dengan pengelola SKB/ PKBM lainnya, aktif mengikuti pelatihan-pelatihan bagi pengelola, tutor, dan warga belajar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen maka ditentukan pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan

Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SKB Pacitan dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah pusat sesuai UU, PP, Permendiknas RI, yaitu menggunakan kurikulum 2006 dengan melaksanakan program SKB berbasis peminatan atau potensi peserta didik dan potensi lokal Pacitan meliputi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan: observasi, analisis dokumen dan pendataan warga belajar, penentuan jenis program dan jadwal pembelajaran; tahap pelaksanaan: dilaksanakan secara terpadu yaitu teori dan praktik, waktu pelaksanaan adalah sehari tiap

minggu, jumlah peserta didik sesuai peminatan, yaitu pendidikan komputer, menjahit, sablon digital, dan *gemstone*, materi pembelajaran dengan modul, ketersediaan fasilitas di SKB cukup baik, metode pembelajaran meliputi ceramah dan praktek, strategi berpusat pada warga belajar; tahap evaluasi dengan ujian tertulis dan uji kompetensi pada lembaga mitra yang ditunjuk. Belum ada kebijakan khusus dari Pemda terkait penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang berfungsi untuk penjaminan mutu.

Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Kewirausahaan

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan, yaitu (1) keterbatasan pendanaan untuk biaya pengembangan, (2) tidak adanya permodalan bagi para lulusan, (3) kurangnya pelatihan dan perhatian dari pihak Pemda dan eksternal.

Terkait dengan hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan pengelola SKB antara lain meningkatkan akses kemitraan dengan lembaga pendidikan dan ketrampilan guna penyelenggaraan pelatihan bagi warga belajar.

Saran

Berdasarkan kondisi obyektif yang ada disarankan: (1) kepada pihak pengelola untuk meningkatkan program kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan dan ketrampilan, lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada dalam kegiatan yang produktif melalui program kewirausahaan, (2) kepada Pemda Pacitan untuk mengeluarkan kebijakan daerah berupa program pendampingan atau peningkatan akses pendidikan yang lebih produktif setara pendidikan formal melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus demi terwujudnya capaian pemerataan akses pendidikan sesuai RPJMD perubahan 2011-2016, (3) kepada lembaga pendidikan dan ketrampilan untuk

meningkatkan kemitraan dalam program pemberdayaan masyarakat yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2010. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung : Alfabeta
- Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung: Alfabeta
- Kamil, Mustofa. 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Republik Indonesia. 1991. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- Supriyono, Agus. 2009. *Cooperative Learning*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sutikno, Sobry. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*. Lombok: Holistica.
- Tim Penyusun. Tanpa tahun. Pengembangan Model Pendidikan Kecakapan Hidup. SD/MI/SDLB-SMP/MTs/SMPLB-SMA/MA/SMALB SMK/MAK. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas. www.puskur.ne